

# PENGARUH INVENTARISASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN ASET TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN WAROPEN)

Jefri Imbiri<sup>1</sup>

Dr. Siti Rofingatun, SE., MM., CBV., CGBA<sup>2</sup>

Bill J.C Pangayow, SE., M.Si., Ak., CA<sup>3</sup>

*Program Studi Magister Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Cenderawasih*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of Bookkeeping, Inventory and Reporting of Assets on the Public Accountability of the Waropen District Government. Respondents in this study were 50 people who were employees who had knowledge about asset utilization and the staff in charge of managing regional goods. The analysis tool in this study uses SPSS with this type of research that is causality which tests the effect of independent variables on dependent so that researchers use Multiple Regression Analysis. Which results of this study must meet the Classical Assumption Test, namely the Normality Test, Multicollinearity Test and Heterocytosis Test. Therefore, the results of this study indicate that simultaneously the accounting, inventory and reporting variables influence public accountability with a significance value of 0,000. However, partially the inventory has an effect on public accountability with a significance value of 0.035. While partially Asset Accounting and Reporting does not affect public accountability with a significance value of 0.078 and 0.071, respectively.*

**Keywords:** *Bookkeeping, Inventory, Asset Reporting and Public Accountability*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi perkembangan baik di dalam maupun luar negeri, serta menghadapi tantangan persaingan global. Oleh karena itu, daerah diberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 22 Tahun 1999).

Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan tersebut berupa amanah yang harus dipertanggung jawabkan

secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah (Mayasani, 2017:14-15)

---

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Magister Akuntansi FEB Uncen

Aset pemerintah daerah adalah sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai hasil peristiwa masa lalu (Halim, 2002:7). Pengelolaan aset daerah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran tentang pengamanan daerah, barang daerah serta kejelasan status kepemilikan dan kekayaan daerah. Pengelolaan aset yang dimiliki daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga pengamanan aset daerah dapat terjaga dengan baik.

Apabila pemerintah daerah dalam penatausahaan aset tidak berjalan dengan baik, maka akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu akan berdampak juga pada kinerja laporan keuangan daerah. Justru sebaliknya apabila pemerintah daerah dalam penatausahaan aset dapat berjalan dengan baik, maka akan memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset daerah yang ada serta dapat digunakan untuk dasar pelaporan keuangan. Penatausahaan aset daerah agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang matang. Selain itu dalam lingkup pengelolaan aset biasanya mencakup pengadaan, penganggaran, pemanfaatan, penggunaan, pengendalian, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan. Selain itu dalam pengelolaan aset yang dimiliki daerah juga meliputi pencatatan dan pelaporannya atau sistem akuntansinya.

Penatausahaan adalah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah). Penatausahaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dilakukan bertujuan untuk mendukung agar data dari aset yang dilaporkan merupakan benar, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pembinaan penatausahaan aset harus diatur dengan sedemikian rupa.

Untuk memperoleh data yang benar dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan dapat menggunakan cara dengan penatausahaan secara tertib dan teratur dari semua aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penatausahaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dilakukan meliputi beberapa rangkaian kegiatan atau tahap-tahap, yaitu pendaftaran, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pengarsipan dokumen barang secara teratur dan tertib sehingga data aset yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai bahan informasi yang sangat berguna. Selain itu penatausahaan aset dapat dikatakan tertib apabila telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pengarsipan dokumen secara baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun terdapat banyak fenomena penyimpangan yang terjadi dalam penerapannya, yaitu diantaranya masih ditemukan kekurangan pada banyak hal, seperti belum terlaksananya ketentuan-ketentuan yang seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah aset yang dimiliki pemerintah daerah juga salah satu merupakan penyebab dari banyaknya penyimpangan yang terjadi, hal ini dikarenakan sulitnya dalam penatausahaan aset yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Waraopen merupakan instansi yang berkedudukan sebagai satuan perangkat daerah dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang merupakan unsur teknis pemerintah Kabupaten Waraopen. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Waraopen mempunyai peranan yang strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Waraopen untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*), maka dapat dilakukakan dengan melaksanakan penatausahaan dengan penyajian aset daerah dalam laporan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien, handal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Waraopen dituntut untuk dapat memaksimalkan pengelolaan aset daerah. Namun dalam penatausahaan aset daerah bukanlah perkara yang mudah, namun terdapat banyak permasalahan yang terjadi dan ada banyak hal yang kurang diperhatikan salah satunya adalah kurang optimalnya pengelolaan data aset daerah dalam inventarisasi aset daerah. Oleh karena itu dalam menyikapi permasalahan tersebut diperlukan evaluasi dalam penatausahaan aset yang dimiliki oleh daerah.

Menurut O.Jones (1994:357), evaluasi adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik

pengukuran, metode analisis, dan bentuk rekomendasi. Spesifikasi mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta criteria yang harus dievaluasi. Pengukuran mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan dan analisis adalah penerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan, sedangkan rekomendasi adalah suatu penentuan mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan adanya evaluasi penatausahaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Waropen diharapkan dapat memberikan berguna dan banyak manfaat. Selain itu evaluasi yang dilakukan tentunya dapat membenahi yang kurang serta memperbaiki kesalahan di masa yang lalu pemerintah daerah dalam penatausahaan aset yang dimiliki daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah, yaitu :

- a. Apakah terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen ?
- b. Apakah terdapat pengaruh Pembukuan aset terhadap akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen ?
- c. Apakah terdapat pengaruh Pelaporan aset terhadap akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inventarisasi aset terhadap Akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembukuan aset terhadap Akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis terdapat pengaruh Pelaporan aset terhadap Akuntabilitas Publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen.

## 2. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 2.1 Pengertian Aset

Harta (aset) adalah kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Ikit, 2015:31). Aset (assets) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas (uang tunai), piutan usaha, perlengkapan, beban dibayar di muka (seperti asuransi), bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten (Wareen et al, 2005:57).

Aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Ada dua jenis aset yaitu aset berwujud (*tangibel*) dan aset tidak berwujud (*intangibile*) (Siregar, 2004:175).

Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

### 2.2 Aset Tetap Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Menurut Abdullah (2009) untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana yang diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

- a. Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Namun, pengakuan besarnya nilai aset tidak sama dengan besaran anggaran belanja modal. Penafsiran atas Permendagri No.13/2006 memungkinkan untuk menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca. Hal ini kurang pas jika neraca dipandang dari konsep akuntansi, karena penilaian suatu aset haruslah sebesar nilai perolehannya (konsep full cost). Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan (ready to use) haruslah dihitung sebagai kos aset bersangkutan. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (input) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai dan belanja barang & jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, kos untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai outcome.
- b. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD. Dalam hal ini, pemerolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Pemda sering menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya.
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. Dokumen kepemilikan barang milik

daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola. Dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.

### 2.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

Sementara itu pengertian aset secara umum dijelaskan oleh (Siregar,2004) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

(Siregar, 2004) mendefinisikan aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam Aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Adapun pengertian sistem menurut W. Gwerald Cole dalam (Siregar,2008) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau prosedur-prosedur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sedangkan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pengelolaan aset daerah mempunyai serangkaian kegiatan atau siklus terdapat 13 kegiatan/tahapan yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
- d. Penggunaan
- e. Penatausahaan
- f. Pemanfaatan
- g. Pemindahtanganan
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
- i. Pembiayaan
- j. Tuntutan ganti rugi

#### 2.3.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif dan dapat menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang baik dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu sistem informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. (Mardiasmo, 2004) menjelaskan ada tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yaitu: perencanaan yang tepat, pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring)

##### 1. Perencanaan

Perencanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan.

## 2. Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPR yang harus melakukan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah, hal ini cukup penting yang diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharannya tidak dikaitkan dengan belanja modal, mestinya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya yang lain harus diperhatikan adalah biaya asuransi kerugian, pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2004) mengatakan ada 4 dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum : terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam pengguna kekayaan daerah.
- b. Akuntabilitas Proses: Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan murah biaya
- c. Akuntabilitas Kebijakan : Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan pengguna dan pemanfaatan kekayaan daerah dan masyarakat luas, akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut

## 3. Pengawasan

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah, dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah

### 2.3.2 Tujuan Pengelolaan Aset Daerah

Lemer dalam (Andriany, 2009) menjelaskan bahwa manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,

penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

### 2.3.3 Asas Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Negara/daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Pengelolaan barang milik Negara/daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelolaan barang dan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan tanggung jawab masing-masing
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan
- c. Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus transparansi terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan agar barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
- f. Asas Kepastian, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

### 2.4 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 17 tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja atau perolehan lainnya yang sah antara lain:

- 1) Dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- 2) Sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- 3) Berdasarkan ketentuan Undang-undang
- 4) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Barang milik daerah sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:

- a. Barang yang dimiliki Pemerintah Daerah yang penggunaannya/ pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan.
- b. Barang yang dimiliki oleh perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan

Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah lainnya.

Barang milik daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. Termasuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud adalah barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada perusahaan daerah/badan usaha milik daerah/ yayasan milik daerah.

Barang milik daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang inventarisasi dan barang pakai habis, barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta di daftar dalam buku inventarisasi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah N0.07 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Klasifikasi aset tetap menurut Permendagri 17 Tahun 2007 dan Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan aset tetap dan barang inventarisasi sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap lainnya, dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

## **2.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Permendagri No 17 tahun 2007 menegaskan dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku:

### **2.5.1 Pembukuan**

Menurut Permendagri No 1 tahun 2008 yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang milik daerah, kegiatan yang dilakukan seperti:

- a. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna (DBP)/daftar barang kuasa pengguna (DBKP).
- b. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan dan pencatatan sesuai format:
  - Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
  - Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
  - Kartu Inventarisasi barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
  - Kartu Inventarisasi barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan jaringan
  - Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Aset Tetap lainnya
  - Kartu Inventarisasi Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
  - Kartu Inventarisasi Ruang (KIR)

### **2.5.2 Inventarisasi**

Menurut Permendagri No 17 Tahun 2007, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah yang berupa, aset fisik yang telah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan, kekayaan berupa potensi seperti kekayaan alam baik yang telah dimanfaatkan maupun belum. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

### **2.5.3 Pelaporan**

- a. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna
- b. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima (Lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
- c. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
- d. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah



- e. Hasil sensus barang dari masing-masing pengguna, di rekap ke dalam buku inventarisasi dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventarisasi tersebut menjadi buku induk inventarisasi
- f. Buku induk inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf e merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
- g. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing OPD setiap semester, dicatat secara tertib pada:
- h. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
- i. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
- j. Buku induk inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
- k. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing OPD setiap semester, dicatat secara tertib pada :
  - Laporan Mutasi Barang;
  - dan Daftar Mutasi Barang.
- l. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
- m. Laporan mutasi barang semester I dan semester II digabungkan menjadi daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan daftar rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
- n. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di pembantu pengelola.
- o. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) Dalam Negeri.
- p. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang.
- q. Format Laporan Pengurus Barang :
  - Buku Inventaris;
  - Rekap Buku Inventaris;
  - Laporan Mutasi Barang;
  - Daftar Mutasi Barang;
  - Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang;
  - Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus;
  - Daftar Barang Milik Daerah yang Digunakannya.

## 2.6 Akuntabilitas Publik

Salah satu unsur yang lain dari konsep pelaporan Keuangan Pemerintah adalah apa yang dimaksud dengan adanya Akuntabilitas, dimana konsep dan pengungkapan perlunya akuntabilitas sudah dimulai sejak zaman Mesopotamia pada tahun 4000Sm, dimana pada saat itu sudah dikenal adanya suatu hukum yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi kewenangan atau wangsit kepadanya.

Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban. namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen.

Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika serikat mendefinisikan istilah accountability sebagai “the requirement for government to answer to the citizenry-to justify the raising of public resources and the purposes for which they used” Akuntabilitas public mengandung

makna bahwa hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program, dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga public harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*public discloursure*), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan. Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Steward tentang jenjang atau tangga akuntabilitas (*Stewart's ladder of Accountability*) yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni (B.Akbar dan siti nurbaya,2000:26)

- a. Akuntabilitas Keuangan
- b. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
- c. Akuntabilitas Proses
- d. Akuntabilitas Program
- e. Akuntabilitas Kebijakan

Lima dimensi Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan :Akuntabilitas Keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana public.
2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum Akuntabilitas Kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public
3. Akuntabilitas Proses  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
4. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
5. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas Kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban Pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan - kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 2.6.1 Indeks Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

**Tabel 1**  
**Indeks Akuntabilitas**

No	Variabel	Indikator
1	Perencanaan dan Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Misi</li> <li>b. Penetapan tujuan dan strategi</li> <li>c. Penyusunan Program</li> <li>d. Realitas</li> <li>e. Luwes</li> <li>f. Berkelanjutan</li> </ol>
2	Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian dengan perencanaan</li> <li>b. Kepatuhan terhadap regulasi</li> <li>c. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol>

3	Pengawasan dan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan indikator dan efisiensi, efektivitas dan dampak</li> <li>b. Mengumpulkan dan mencatat informasi</li> <li>c. Menganalisa informasi</li> <li>d. Ketersediaan laporan pemeriksaan.</li> </ul>
4	Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanggungjawab dana public</li> <li>b. Jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi</li> <li>c. Penyajian tepat waktu</li> <li>d. Pemeriksaan</li> <li>e. Respon yang cepat</li> </ul>
5	Kepercayaan/ <i>Stakeholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keyakinan dan kepercayaan publik/<i>public stakeholder</i></li> <li>b. Partisipasi Publik</li> <li>c. Wawasan dan pengetahuan publik</li> <li>d. Ketaatan terhadap aturan</li> <li>e. Kepercayaan dan dan kepuasan <i>public stakeholder</i></li> <li>f. Kesadaran publik stakeholder akan haknya</li> <li>g. Kesesuaian kegiatan-kegiatan pemerintah</li> </ul>

Sumber : Aman, Al-Shbail, & Mohammed, (2013)

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang serupa. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Tumarar, dkk pada tahun 2015 mengenai Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah khususnya dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengguna barang milik daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan Barang Milik Daerah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, begitu juga dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan belum semua kegiatan Pemanfaatan telah dilaksanakan. Kepada Pimpinan DPPKBMD Kota Tomohon agar membuat pelatihan teknis kepada pegawai supaya pelaksanaan penggunaan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hilmah Kh pada tahun 2013 mengenai Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di Pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam

pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, harapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang dengan cara menyediakan bidang khusus penatausahaan di DPKA Kota Padang. Bagi Pemko Padang, diharapkan adanya upaya untuk mensosialisasikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada DPKA supaya mudah melaksanakan penatausahaan dan akuntansi aset. Bagi masyarakat diharapkan adanya partisipasi berupa penilaian baik atau buruk kinerja pemerintah.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dwiharyadi, dkk pada tahun 2012 mengenai Analisis Dan Evaluasi Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintahan bersih dan tata pemerintahan yang baik harus didukung oleh (transparansi), (akuntabilitas), (aturan huku.), (efektivitas & efisiensi), orientasi konsensus, responsiveness, equity & inclusiveness dan (partisipasi). Oleh sisi pelaporan keuangan, ini adalah untuk menciptakan sistem yang baik guna mengendalikan proses manajemen pemerintah untuk mengurangi kesalahan manusia dan salah saji. DPKA Kota Padang telah menerapkan sistem akuntansi yang cukup bagus sehingga DPKA Kota Padang dapat berjalan dengan baik. Tapi, ada beberapa prosedur yang harus direvisi agar bisa membuat sistem yang lebih baik. Ada beberapa dokumen yang tidak benar, kurang atau lebih. Selain fungsi di atas masih terjadi dalam sebuah prosedur. Sistem rekonstruksi yang tepat diharapkan dapat membuat DPKA Kota Padang berjalan lebih efektif dan efisien.

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

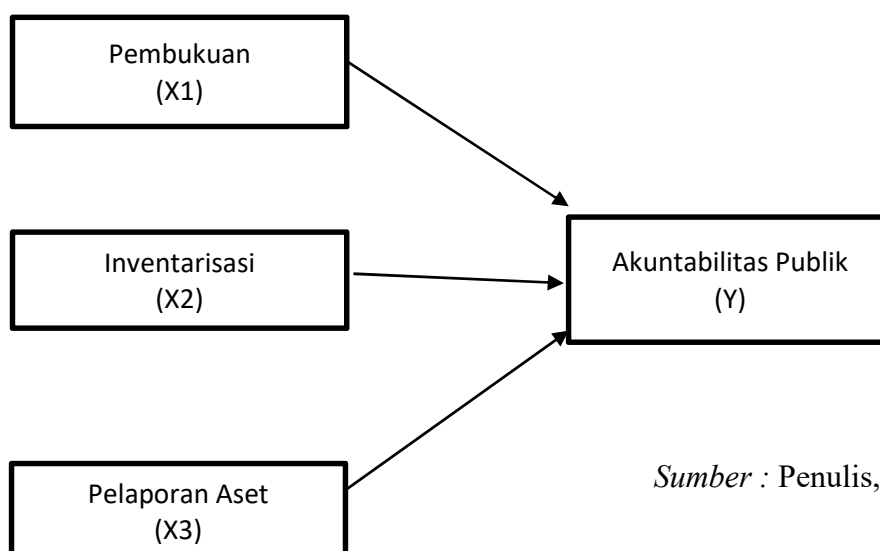
Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Diduga pembukuan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kabupaten Waropen
- H2 : Diduga Inventarisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kabupaten Waropen
- H3 : Diduga Pelaporan Aset berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kabupaten Waropen.

## 2.9 Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen. Model penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



*Sumber : Penulis, 2018*

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang bekerja pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Waropen. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui pembagian kuesioner di lapangan atau tempat penelitian dan wawancara secara langsung dengan responden. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara (Diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifatnya saling melengkapi.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Adapun Lokasi penelitian ini bertempat pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen.

#### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono dalam Aronggear (2015). Populasi adalah keseluruhan subyek yang hendak diteliti Arikunto dalam Aronggear (2015). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Waropen.

##### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan serta yang mengerti dan mampu memberikan gambaran sesuai dengan tujuan penelitian (Jusmin, 2013). Adapun kriteria-kriteria yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Staf yang memiliki pengetahuan tentang manajemen aset pada OPD ditempati bekerja, serta bertanggung jawab langsung atau pihak yang berwenang dalam mengurus barang.
2. Responden merupakan staf pengelola barang yang telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (tahun) sebagai staf pada OPD tersebut.

#### **3.4 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembukuan (X1), Inventarisasi (X2), dan Pelaporan Aset (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik (Y).

#### **3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran**

##### **3.5.1 Pembukaan**

Menurut penjelasan Permendagri No 17 tahun 2007 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

### 3.5.2 Inventarisasi

Inventarisasi aset adalah proses kerja yang terkait dengan cara pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi baik fisik maupun legal Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

### 3.5.3 Pelaporan Aset

Pelaporan Aset tetap yaitu proses melaporkan penggunaan barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada kepala daerah melalui pengelola dan melakukan rekapitulasi serta sensus barang. Kuesioner yang digunakan dengan mengacu pada kuesioner Jusmin (2013), variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5

### 3.5.4 Akuntabilitas Publik

Mahsun, (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (Field research), yaitu data yang di kumpul melalui kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti dan kemudian untuk tiap jawaban diberikan nilai (score) serta wawancara langsung kepada para pegawai. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang digunakan pada penelitian Jusmin (2013). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikannya kepada pegawai yang bekerja serta sesuai dengan kriteria pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Waropen.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012). Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan individual antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon,$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Publik

X1 = Pembukuan

X2 = Inventarisasi;

X3 = pelaporan;

$\varepsilon$  = kesalahan acak (random error)

$\beta_0$  = konstanta;

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_0$  = koefisien regresi;

### 3.8 Uji Kualitas Instrumen

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

#### 3.8.1 Uji Validitas

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

#### 3.8.2 Uji Reliabilitas

Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti akuntansi, manajemen, psikologi, dan sosiologi, variabel-variabel penelitiannya dirumuskan sebagai sebuah variabel latent atau un-observeb atau konstruk, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator yang diamati dengan menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang suatu hal. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach apla* lebih besar dari 0,60 (Prayitno, 2012).

### 3.9 Uji Asumsi Klasik

Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. :

#### 3.9.1 Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Danang, 2011). Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui grafik histogram dan normal probability plot. Untuk grafik histogram, jika data rill membentuk garis kurva cenderung tidak simetri terhadap mean (U) maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal, begitupun sebaliknya. Sementara untuk cara normal probability plot, dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal (Danang, 2011).

#### 3.9.2 Uji Multikolonieritas

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari minimal dua variabel bebas, dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat digunakan cara sebagai berikut.

- a. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.6.
- b. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
- c. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat.

Dapat disimpulkan bahwa, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Nilai Tolerance (a) dapat dihitung dengan persamaan ( $a = 1/VIF$ ), sementara nilai Variance Inflation Factor dapat dihitung dengan persamaan ( $VIF = 1/a$ ). Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika  $a_{hitung} < a$  dan  $VIF_{hitung} < VIF$  (Danang, 2011).

### 3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Dengan uji Glejser, heteroskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari besar 0,05. Sementara homoskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

## 3.10 Uji Hipotesis

### 3.10.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (Ghozali, 2016).

### 3.10.2 Uji Parsial (Uji t)

#### 1) Hipotesis

- a.  $H_0$  = Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Waropen.
- b.  $H_a$  = Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Waropen

#### 2) Kriteria Pengujian

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak
- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima

### 3.10.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan sudah fix atau tidak. Dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat  $\alpha$  5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

#### 1. Hipotesis

- a.  $H_0$  = Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Waropen.
- b.  $H_a$  = Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Waropen.

#### 2. Kriteria Pengujian

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak
- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima.



#### 4. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

##### 4.1 Deskripsi Penelitian

##### 4.1.1 Pengumpulan Data

Hasil dari studi lapangan yang dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Waropen dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada masing-masing OPD . Empat variabel pokok dalam penelitian ini, yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen. Berikut ini adalah rincian hasil pengumpulan data yang tercantum pada Tabel 4.1, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah	Presentase %
Kuesioner yang disebar	50	100%
Kuesioner yang kembali	32	64%
Kuesioner yang tidak kembali	18	36%
Kuesioner yang tidak lengkap	1	1%
<b>RESPON RATE</b>	<b>31</b>	<b>62%</b>

*Sumber:* Diolah oleh Penulis (2018)

Kuesioner yang telah disebar berjumlah 50 kuesioner dan yang dikembalikan sejumlah 32 terdapat sedangkan sebanyak 18 kuesioner tidak kembali, sehingga tingkat pengembaliannya sebesar (36%).

**Tabel 2**  
**Nama Instansi yang Mengembalikan Kuesioner**

No	Nama Instansi	Jumlah
1	Dinas P2K	3
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4
3	Dinas Pendidikan	4
9	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup	2
4	Dinas Perikanan	2
5	Dinas Perindakop UKM dan Transportasi	2
6	Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	2
7	Dinas Pekerjaan Umum	3
8	Dinas Sosial	4
9	Inspektorat	2
10	SATPOL PP	2
11	Sekretariat Daerah	1
Total		31

*Sumber:* Diolah oleh Penulis (2018)

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden**

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
	31	100%
Laki-laki	17	53%

Jenis Kelamin	Perempuan	15	44%
	Usia	21-30	16
Usia	31-40	9	28%
	41-50	6	18%
	51-60	1	3%
	Pendidikan	SLTA	8
Pendidikan	S1	20	62%
	S2	4	12%
	S3	0	0

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing-masing variabel yang digunakan. Pengolahan data ini menggunakan program SPSS versi 16.00. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 4.4, sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPBU	31	9.00	20.00	15.7097	2.41100
TIVT	31	10.00	20.00	16.1290	2.30567
TPLP	31	9.00	15.00	11.7097	1.44207
TAKB	31	13.00	25.00	18.8387	3.14215
Valid N (listwise)	31				

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2018)

Hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.4 yang merupakan hasil pengukuran deskriptif masing-masing variabel dari 31 data pengamatan, menunjukkan rentang skala teoritis dari nilai *minimum* dan *maximum*, kemudian hasil nilai rata-rata (*mean*) serta nilai dari standar deviasinya. Penjelasan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Pembukuan merupakan variabel independen pertama ( $x_1$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 4 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 4 – 20. Dari Tabel 4.4 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 9 dan nilai *maximum* sebesar 20. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 15,20 dan standar deviasinya sebesar 2,411.

Variabel Inventarisasi merupakan variabel independen kedua ( $x_2$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 4 item pertanyaan sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 4 – 20. Dari Tabel 4.6 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 10 dan nilai *maximum* sebesar 20. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 16,20 dan standar deviasinya sebesar 2,53.

Variabel Pelaporan aset merupakan variabel independen ketiga ( $x_3$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 3 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 3 – 15. Dari Tabel 4.6 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 9 dan nilai *maximum* sebesar 15. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 11,7 dan standar deviasinya sebesar 1,44.

Variabel Akuntabilitas Publik merupakan variabel deependen ( $y$ ) dari penelitian ini yang menggunakan 5 item pertanyaan, sehingga rentang teoritis yang ada sebesar 5-25. Dari Tabel 4.6 juga dapat terlihat rentang aktual variabel mempunyai nilai *minimum* sebesar 13 dan nilai *maximum* sebesar 25. Adapun juga nilai rata – rata untuk seluruh jawaban responden adalah sebesar 18,87 dan standar deviasinya sebesar 3,14.

Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 3,74 yaitu Laporan barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD untuk disampaikan kepada Pengelola barang. Nilai rata-rata dari 3 item pernyataan variabel Pelaporan Aset (X3) adalah 3.90 yang berarti bahwa Pelaporan aset dalam kategori setuju.

### 4.3 Uji Kualitas Data

#### 4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007:45). Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dalam mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Correlated Item – Total Corelation* dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau signifikan di bawah 0,05 maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan *valid*.

**Tabel 5**  
**Uji Validitas Variabel Pembukuan**

PBU	R Hitung	Signifikan	Keterangan
PBU.1	0,780	0,000	Valid
PBU.2	0,794	0,000	Valid
PBU.3	0,900	0,000	Valid
PBU.4	0,486	0,000	Valid

*Sumber:* Diolah oleh Penulis (2018)

**Tabel 6**  
**Uji Validitas Variabel Inventarisasi**

IVT	R Hitung	Signifikan	Keterangan
IVT.1	0,650	0,000	Valid
IVT.2	0,870	0,000	Valid
IVT.3	0,654	0,000	Valid
IVT.4	0,601	0,000	Valid

*Sumber:* Diolah oleh Penulis (2018)

**Tabel 7**  
**Uji Validitas Variabel Pelaporan Aset**

PLP	R Hitung	Signifikan	Keterangan
PLP.1	0,611	0,000	Valid
PLP.2	0,608	0,000	Valid
PLP.3	0,643	0,000	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

**Tabel 8**  
**Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik**

AKP	R Hitung	Signifikan	Keterangan
AKP.1	0,534	0,000	Valid
AKP.2	0,606	0,000	Valid
AKP.3	0,668	0,000	Valid
AKP.4	0,790	0,000	Valid
AKP.5	0,748	0,000	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel maupun semua item pertanyaan dari variabel Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan Aset dan Akuntabilitas Publik memiliki nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel (0,286) atau signifikan  $0,00 < 0,05$ , sehingga instrumen untuk seluruh variabel di dalam penelitian ini dapat dinyatakan *valid*.

#### 4.3.2 Uji Realibilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan realilabel apabila memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2011).

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	Keterangan
Pembukuan	0,736	4	<i>Reliabel</i>
Inventarisasi	0,651	4	<i>Reliabel</i>
Pelaporan Aset	0,601	3	<i>Reliabel</i>
Akuntabilitas Publik	0,700	5	<i>Reliabel</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2016)

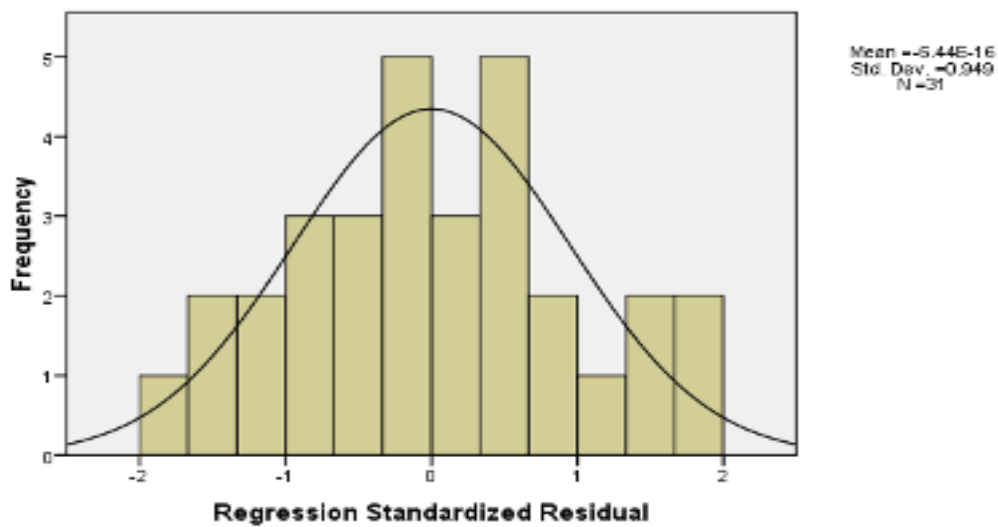
Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, yang merupakan hasil pengolahan SPSS untuk uji reliabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* untuk semua pertanyaan variabel Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan Aset dan Akuntabilitas Publik,  $> 0,6$  yaitu nilai *Cronbach's Alpha* dari masing – masing variabel sebesar 0.736, 0,651, 0,601, 0,700  $> 0,6$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel independen dan dependen di dalam penelitian ini bersifat *realiabel*.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

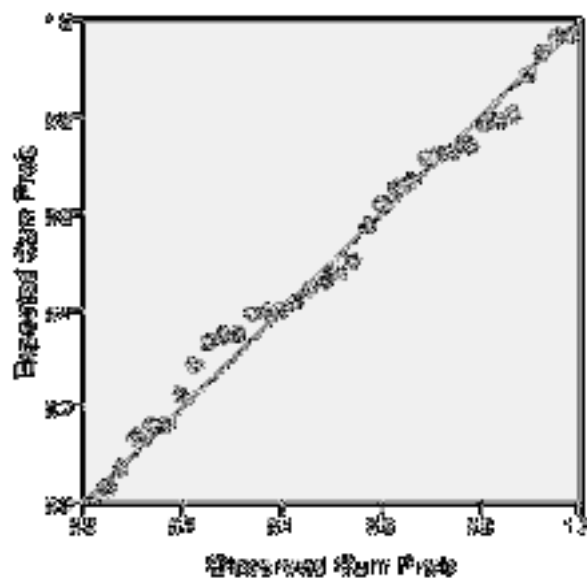
##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali I. , 2016). Berikut ini adalah hasil uji *plot*. Apabila *ploting* data membentuk satu garis lurus diagonal maka distribusi data adalah normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan diagram.

**Gambar 2**  
**Uji Normalitas Histogram**  
**Dependent Variable: TAKB**



**Gambar 3**  
**P-P Plot**  
**Dependent Variable: TIL**



Sumber : Data olahan SPSS 16

Pada tampilan grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil tersebut, maka dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34772207
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.384
Asymp. Sig. (2-tailed)		.998
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data olahan SPSS 16

Tabel 4.9 menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,384 dan signifikansi pada 0,998(>0,05) yang menunjukkan nilai residual telah terdistribusi secara normal yang mendukung uji normalitas dengan grafik.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali,2006). Multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali,2006).

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TBU	.829	1.205
	TIVT	.918	1.089
	TPLP	.826	1.211

Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)

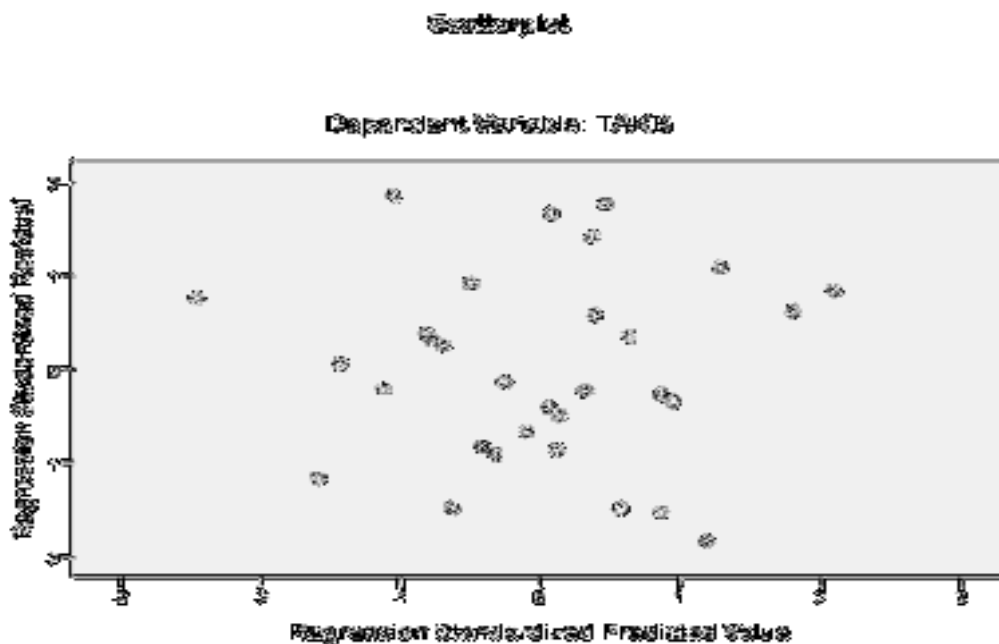
Berdasarkan Tabel 4.15 yang merupakan hasil multikolinieritas, dapat dilihat besaran nilai *tolerance* dari masing – masing variabel independennya yang didapatkan yaitu 0,967 yang berarti lebih besar dari 0,1 dan VIF (*variance inflation factor*) masing – masing variabel sebesar 1,035 atau

lebih kecil dari 10, maka dari hasil nilai *tolerance* dan VIF, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas didalam model regresi penelitian ini.

#### 4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya dan melihat ada tidaknya pola nilai tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2018)

Berdasarkan Gambar 4.3 yang merupakan hasil uji heteroskedastisitas, dapat dilihat titik – titik pada grafik *scatterplot* tidak terjadi pengumpulan atau membentuk suatu pola tertentu melainkan hasil yang terjadi adalah terlihat pola titik – titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 <sup>a</sup>	.442	.380	2.47472

a. Predictors: (Constant), TPLP, TIVT, TPBU

b. Dependent Variable: TAKB

*Sumber:* Diolah oleh Penulis (2018)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diatas menunjukkan tingkat pengaruh ketiga variabel independen yaitu Pembukuan, Invenstasi dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen adalah sebesar 38% dan sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor lain diluar kedua variabel independen dalam penelitian ini. Angka tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.16 dimana *adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.442 atau 44,2%.

#### 4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Akuntabilitas Publik.

**Tabel 13**  
**Hasil Parsial (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.965	4.564		-.431	.670
TPBU	.376	.206	.289	1.829	.078
TIVT	.453	.205	.332	2.215	.035
TPLP	.648	.345	.297	1.878	.071

a. Dependent Variable: TAKB

*Sumber:* Hasil Pengeolah SPSS (2018)

## 4.6 PEMBAHASAN

### 4.6.1 Pembukuan Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Pembukuan ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Publik ( $Y$ ) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $1.829 < 1.971$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,078 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa variabel Pembukuan ( $X_1$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Akuntabilitas Publik. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini **ditolak**.



Ketidaksignifikan ini mungkin disebabkan oleh pengguna/kuasa pengguna barang belum melakukan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan sebagian besar pegawai subbidang asset tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan hal ini terlihat dari jawaban responden dalam pengisian kuesioner. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriany, 2009), (Siregar, 2008) dan (Simamora, 2011) yang menyatakan bahwa pembukuan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah. Hal ini disebabkan karena Pengguna barang dan pengurus barang di OPD tidak melaksanakan proses pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMD, Laporan BMD dan Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.

#### **4.6.2 Inventarisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Inventarisasi ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $2,215 > 1,971$  dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu  $0,035 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Inventarisasi ( $X_2$ ) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Akuntabilitas Publik. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_2$ ) pada penelitian ini **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2013) yang menyatakan bahwa kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki oleh atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD).

Hasil dari inventarisasi digunakan untuk memutakhirkan data KIB (KIB A, B, C, D, E dan F). Selanjutnya KIB tersebut akan dikompilasi menjadi buku inventaris. Buku Inventaris memberikan informasi semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, data barang (lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya). Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; pemanfaatan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; serta menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Inventarisasi harus diadministrasikan dengan tepat dan lengkap untuk dapat menyajikan informasi yang valid dan relevan. Informasi tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kekayaan daerah. Suatu informasi yang diperoleh dari data yang tidak valid dan relevan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah.

#### **4.6.3 Pelaporan Aset Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 4.17 membuktikan bahwa hasil uji regresi diatas untuk variabel Pelaporan ( $X_3$ ) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) pada Pemerintah Kabupaten Waropen memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar  $1,878 < 1,971$  dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu  $0,071 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pelaporan ( $X_3$ ) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Akuntabilitas Publik. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini **ditolak**.

Kurangnya koordinasi internal OPD menyebabkan belum maksimalnya penatausahaan aset tetap sejalan dengan penelitian Quirin & O'Bryan (2014). Dimana hal ini disebabkan pengurus barang

masih kesulitan dalam mendapatkan informasi/ data tentang dokumen (tanggal dan nomor kontrak), tahun pembelian/perolehan serta harga atas barang/aset tetap, untuk disajikan dalam laporan aset (Bova, 2016). Koordinasi merupakan hal penting yang harus dilakukan terutama dalam internal OPD karena merupakan suatu kebutuhan dalam mengomunikasikan setiap pelaksanaan tugas masing-masing individu yang ada di OPD, baik antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan atasannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Koordinasi yang kurang baik akan mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab dan merasa bahwa ruang lingkup pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas dan wewenangnya.

Pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen periode belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan, disamping itu terdapat kesalahan dalam kegiatan penggolongan dan pengungkapan aset tetap serta tidak dilaksanakannya penyusutan terhadap aset.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah kabupaten Waropen dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembukuan Aset tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,078.
- b. Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,035.
- c. Pelaporan Aset Tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,071.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah kabupaten Waropen ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang terbatas yaitu sebanyak beberapa OPD sehingga hasilnya belum dapat digeneralisir pada jumlah sampel yang lebih besar.
2. Penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
3. Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik cukup banyak, sedangkan penelitian ini hanya melihat pengaruh pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset.

### **5.3 Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah agar meningkatkan akuntabilitas publik terkait pembukuan dan pelaporan aset. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan khusus bagi pegawai yang bekerja pada bagian aset.
2. Untuk pemerintah daerah agar dalam mengangkat dan menunjuk pegawai yang bekerja sebagai pengurus barang yaitu pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah ilmu akuntansi, sehingga dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas publik terkait inventarisasi, pembukuan dan pelaporan aset dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Untuk pemerintah daerah agar dalam Pemberhentian dan pengangkatan bendahara barang harus memperhatikan masa kerja bagi PNS tersebut sehingga tujuan dalam meningkatkan akuntabilitas publik terkait pembukuan dan pelaporan asset dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperluas atau menambah jumlah sampel sehingga hasil peneliti dapat tergeneralisir ke semua objek.
5. Untuk peneliti selanjutnya juga dapat melengkapi metode survey dengan wawancara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aman, A., Al-Shbail, T. A., & Mohammed, Z. (2013). Enhancing public organizations accountability through E-Government systems. *International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences*, 1(1), 15–21. Retrieved from <http://www.worldairco.org/IJCMSS/December2013Paper22.pdf>
- Anderson, James A. 1975. Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences. New York: Praeger University Series.
- Anggreani, Ayang P.S. (2015). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim : Malang
- Arifin, Zainal. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmansyah, (2005) Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Otonomi Daerah; evaluasi & proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa-Partnership, Jakarta;
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikit. 2015. Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Deepublish.
- Jones, Charles O. 1994. engantar Kebijakan Publik Terjemahan Ricky Istamto, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayasani, Dewi Nur. 2017. Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi (JAK)*.
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahmadi, S. 2013. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung Palembang. Skripsi. Universitas Tridinarti Palembang
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 225/MK/V/4/1971.
- Siregar, D. D. 2004. Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

- Sari, Dwi Pratiwi. 2012. Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011. Skripsi. Universitas Indonesia
- Subagyo, P Joko. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Progam. Jakarta: Rineka Cipta.
- The Liang Gie. 1984. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty Nur Cahya.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Wareen, Carls., Reeve, M James., Fess, Philips E. 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Wursanto. 1989. Manajemen Kepegawaian. Yogyakarta: Kanisius.